

**ANALISA YURIDIS
TERHADAP STATUS HUKUM KAPAL LATIH
MILIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(BPSDMP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

TESIS

**Oleh:
ADE TRI NUGRAHA
202120251019**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **“ANALISA YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM KAPAL LATIH MILIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BPSDMP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN”**

Nama Mahasiswa : **ADE TRI NUGRAHA**


Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251019

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Bekasi, Maret 2023
MENYETUJUI,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.
NIDN. 0004056310

Pembimbing II,



Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **"ANALISA YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM KAPAL LATIH MILIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BPSDMP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN"**

Nama Mahasiswa : **ADE TRI NUGRAHA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **202120251019**

Program Studi / Fakultas : **Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum**

Program Konsentrasi : **Hukum Tata Negara**

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **03 April 2023**

Bekasi, 10 April 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : **Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.**
NIDN. 0319046403

Penguji I : **Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.**
NIDN. 0004056310

Penguji II : **Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.**
NIDN. 0325117405

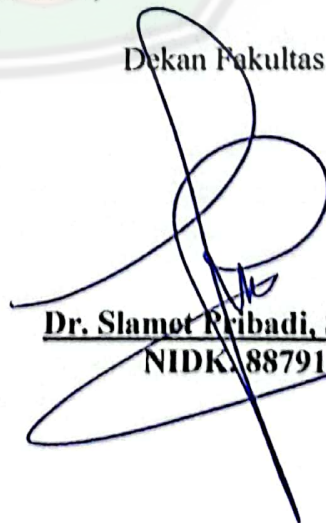
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: Tesis yang berjudul “*ANALISA YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM KAPAL LATIH MILIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BPSDMP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN*” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, April 2023

Yang membuat pernyataan,



Ade Tri Nugraha
NPM. 202120251019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ade Tri Nugraha

Tempat, Tgl lahir : Jakarta, 9 Juni 1982

Jenis kelamin : Laki-Laki

Status : Menikah

Alamat : Jl. Senopati 7 No. 10 Perumahan Puri Juanda Regency
Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi 17111

Telepon : 0821 1234 2244

Email : hasbiahmadinejad@gmail.com

Menerangkan dengan sebenarnya,

Pendidikan

1988 – 1994 SD Negeri Duren 08 Bekasi Timur, Bekasi

1994 – 1997 SMP Negeri 11 Bekasi

1997 – 2000 SMA PGRI 1 Bekasi

2000 – 2005 Ilmu Komunikasi - FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

2017 – 2021 Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya

Pengalaman Organisasi

1998 – 2000 Anggota Osis SMA PGRI 1 Bekasi

1999 – 2000 Ketua Pelajar Pecinta Alam (PETALA) SMU PGRI 1 Bekasi

2002 – 2004 Sekretaris Umum HMI Komisariat Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta

2002 – 2004 Ketua Bidang Humas dan Komunikasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DKI Jakarta

2003 – 2004 Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

- 2004 – 2005 Ketua Senat Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
- 2003 – 2005 Ketua Karang Taruna Rukun Warga 017 Kel. Aren Jaya – Bekasi
- 2017 – 2021 Ketua Umum Indonesian Green Ranger
- 2020 – 2021 Ketua Harian PATAGA INDONESIA
- 2021 – 2024 Anggota Dewan Pembina Indonesian Green Ranger
- 2021 – 2025 Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) DKI Jakarta

Pengalaman Pekerjaan

- 2003 – 2005 Jurnalis Harian Rakyat Merdeka Jakarta
- 2006 – sekarang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Saya yang bersangkutan,



ADE TRI NUGRAHA
NPM. 202120251019

ABSTRAK

Ade Tri Nugraha. 202120251019. *"Analisa Yuridis Terhadap Status Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan (BPSDMF) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran"*.

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) masalah penelitian. Pertama, Bagaimana Kelemahan-kelemahan Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran? Dan 2. Bagaimana Konstruksi Ideal dari Status Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan di masa yang akan datang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran menyeluruh dengan melihat fakta yang berhubungan dengan permasalahan sehingga dapat membuktikan permasalahan agar dapat mendapat suatu jawaban yang ilmiah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pengelolaan kapal latih milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) saat ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan untuk mengonstruksi dan menjelaskan status hukum pengelolaan kapal latih milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Negara Hukum, Kewenangan, Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), Status Hukum, Pelayaran, dan Kapal Latih.

ABSTRACT

Ade Tri Nugraha. 202120251019. *"Juridical Analysis of the Legal Status of Training Ships Owned by the Human Resources Development Agency of the Ministry of Transportation (BPSDMF) Based on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping"*.

In this paper, there are 2 (two) problems studied, namely the first related to weaknesses in the Management of Training Ships Owned by the Transportation Human Resources Development Agency (BPSDMP) of the Ministry of Transportation in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, and second is about the future Ideal Construction of the Legal Status of Training Ships Owned by the Transportation Human Resources Development Agency of the Ministry of Transportation.

The method used in this research is normative juridical. This type of research is normative juridical which means the approach is carried out by examining the approaches of theories, concepts, reviewing the laws and regulations concerned with this research or the statutory approach. The normative juridical method is used to find out and obtain an overall picture by looking at the facts related to the problem so that it can prove the problem in order to get a scientific answer.

The purpose of this study is to analyze the weaknesses in the management of training ships owned by the Transportation Human Resources Development Agency currently in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping and to construct and explain the legal status of managing training ships owned by the Human Resources Development Agency of the Ministry of Transportation in the future.

Keywords: rule of law, authority, legal discovery theory (*rechtsvinding*), legal status, shipping and training vessels.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, yang selalu melimpah terhadap penulis ditengah perjuangan dalam penulisan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti. Sholawat serta salam tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah menjadi panutan kita semua umat manusia di muka bumi karena ilmu dan tauladannya.

Penulisan tesis ini, penulis memilih judul: *Analisa Yuridis Terhadap Status Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan (BPSDMF) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Terutama kepada keluargaku tercinta, Almarhum Ayahanda H. Djayusman tercinta (kupersembahkan karya ini untukmu), dan Mamahku Hj. Urip Yati, Untuk Istri, Anakku Tercinta Muhammad Hasbi Ahmadinejad yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril, Untuk Kakak dan Adikku yang selalu memberikan do'a dan semangat.

Tesis ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Lusia Sulastri, S.H, M.H., selaku ketua Program Studi Mgister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., selaku Guru Besar sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan waktunya selama ini memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan waktunya selama ini memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Untuk Seorang atas waktu, diskusi, debat, dan bantuan pemikiran. Ada beberapa perasaan yang menghangatkan hati saya: semangat, inspirasi dan syukur. Dan sungguh menakjubkan bagaimana semua hal itu ada dan pada akhirnya saya merasa sangat berterima kasih.
7. Para Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Para Staf Fakultas Hukum dan seluruh civitas akademik yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau semua.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2021, atas ilmu, kebaikan dan canda tawa ceria selama ini. Semoga silaturahmi kita takkan pernah putus.
9. Untuk sahabat saya di Kelas Hukum Tata Negara yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam perkuliahan yang telah memberikan kesan dan pesan yang mendalam selama berkuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Untuk para pejabat dan rekan sejawat di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, BPSDM Kementerian

10. Untuk para pejabat dan rekan sejawat di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, BPSDM Kementerian Perhubungan atas diskusi, kontribusi informasi dan pengetahuan yang terus menerus diberikan kepada penulis yang sehingga pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan tepat waktu.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini.

Bekasi, April 2023

Peneliti



Ade Tri Nugraha



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Kegunaan Penelitian.....	14
1.5. Kerangka Konseptual.....	18
1.6. Kerangka Teori.....	23
1.7. Kerangka Pemikiran.....	23
1.8. Metode Penelitian.....	23
1.9. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Tentang Status Hukum.....	26
2.2. Tinjauan Tentang Pelayaran.....	34
2.3. Kapal Latih.....	38
BAB III	KELEMAHAN-KELEMAHAN HUKUM PENGELOLAAN KAPAL LATIH MILIK BADAN

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN (BPSDMP) KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**

3.1	Pengelolaan dan Pengoperasian Kapal Latih Saat ini Masih Menggunakan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) dan atau Rupiah Murni Milik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat	43
3.2	Tidak Adanya Balai Pengelola Kapal Latih.....	60
3.3	Lemahnya Model Pengelolaan Kapal Latih Dengan Pembentukan Satker Baru Balai Pengelola Kapal Latih (Opsi 2).....	60
3.3	Lemahnya Model Pengelolaan Kapal Latih Dengan Perusahaan Pelayaran Bumn (Opsi 3)	60
3.3	Penyusunan Sop Pengelolaan Kapal Latih Masih Dalam Proses.....	60

BAB IV

**KONSTRUKSI IDEAL STATUS HUKUM
PENGELOLAAN KAPAL LATIH MILIK BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN (BPSDMP) KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN DI MASA YANG AKAN DATANG**

4.1	Visi dan Misi Presiden
4.2	Visi dan Misi Kementerian Perhubungan
4.3	Visi Dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2020-2024
4.4	Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
4.5	Realisasi Pelaksanaan Kebijakan
4.6	Penemuan Hukum sebagai Kontruksi Hukum Kapal Latih
4.7	Terobosan Hukum
4.8	Pembaharuan Hukum

BAB V

PENUTUP

5.1	Kesimpulan	105
5.2	Saran.....	106

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	107
--------------------------------	------------